

**PEMBERDAYAAN LITERASI MEDIA DAN INFORMASI (LMI) UNESCO  
SEBAGAI SARANA PENCEGAHAN PENYEBARAN HOAKS**

*DISSEMINATION OF UNESCO MEDIA AND INFORMATION LITERATION (LMI) TO  
PREVENT THE SPREAD OF HOAX*

**Shary Charlotte Henriette, S.I.P, M.A. dan Dr. Reni Windiani, MS**

Departemen Hubungan Internasional Universitas Diponegoro

Email: [charlotte\\_pattipeilohy@ymail.com](mailto:charlotte_pattipeilohy@ymail.com)

Diterima: 17 Mei 2018, Direvisi: 28 Mei 2018, Disetujui: 1 Juni 2018

**ABSTRAK**

Artikel ini merupakan hasil dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro kepada enam Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Semarang. Tingginya akses informasi melalui sosial media di kalangan remaja SMA menyebabkan mereka rentan terdampak berbagai macam “penyimpangan informasi”. Oleh karena itu, penyuluhan untuk meningkatkan Literasi Media dan Informasi (LMI) dirasa sangat dibutuhkan. Mekanisme LMI yang dikeluarkan oleh The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) digunakan dalam penyuluhan ini sebagai sarana untuk mewujudkan literasi informasi dalam sistem demokrasi. Materi penyuluhan inimenyangkut (1) Pemahaman Hoaks sebagai penyimpangan informasi Mis-informasi; Dis-informs;i dan Mal-informasi, (2) Melawan Disinformasi dan Misinformasi melalui LMI, serta (3) Ex-Post Fact Checking / Memeriksa Fakta setelah Dipublikasikan.

Kata kunci : literasi media dan informasi, LMI, UNESCO, hoaks, ex-post fact checking

**ABSTRACT**

*This article is part of community service of International Relations Department, Universitas Diponegoro to six targeted high schools in Semarang. Elevated access of information through social medias among high school adolescents makes them vulnerable to “information disorder”. Therefore, counseling for Media and Information Literacy (LMI) is highly necessary. The LMI mechanism issued by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) is used to educate high school students for better information literacy in democracy. The counseling materials included (1) Understanding Hoaks as a deviation of information: Mis-information; Dis-information, and Mal-information, (2) Fighting Disinformation and Misinformation through LMI, and (3) Ex-Post Facts to Check.*

*Keywords : media and information literacy, MIL, UNESCO, hoax, ex-post fact checking*

**PENDAHULUAN**

Perkembangan internet dan media sosial dalam kehidupan masyarakat di dunia sudah tidak dapat diragukan lagi. Penelitian *Digital in 2018* yang dikeluarkan oleh perusahaan media Inggris

bernama *We Are Social* menyebutkan bahwa dari total 7,5 miliar penduduk dunia, sekitar 4 miliar penduduk sudah menggunakan internet, dan 3 miliarnya sudah menggunakan media sosial sebagai sarana komunikasi. Ini berarti internet

sudah dapat diakses dan digunakan oleh setengah dari penduduk dunia. Penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa dari sepuluh media sosial yang diteliti (Whatsapp, Facebook Messenger, Viber, Wechat, Line, Telegram, IMO, Kakaotalk, Hangouts, dan Android Messenger), Aplikasi Whatsapp dan Facebook Messenger merupakan aplikasi yang paling sering digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Laporan *Digital in 2018* juga menampilkan data bahwa Indonesia menempati posisi keempat sebagai negara dengan masyarakat yang paling sering mengakses internet. Dalam satu hari, rata-rata masyarakat Indonesia mengakses internet selama 8 jam 51 menit. Indonesia juga menempati posisi ketiga sebagai negara dengan perkembangan media sosial tercepat di dunia (dengan rata-rata pertumbuhan 23% per tahun). Tingginya pertumbuhan media sosial di Indonesia, ternyata didorong oleh peningkatan jumlah remaja umur 13-19 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang mengakses media sosial setiap harinya. Tanpa adanya kemampuan untuk memilah informasi yang tersedia dalam media sosial dan media lainnya, maka masyarakat akan mudah termakan isu hoaks, yang akan merugikan dirinya dan orang lain. Selain itu, informasi hoaks juga menciptakan prasangka buruk terhadap individu atau kelompok tertentu yang akan mengganggu keamanan dan perdamaian di negara ini.

Mengingat pentingnya literasi media dan informasi, maka The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) berkomitmen untuk mewujudkannya melalui kerangka kerja global *Media and*

*Information Literacy* (Literasi Media dan Informasi / LMI). Literasi informasi berkaitan dengan pengelolaan data dan informasi yang diterima oleh masyarakat, sedangkan literasi media berfokus pada penggunaan media bagi pembangunan dan demokrasi yang lebih baik (UNESCO, 2013, p. 30). Inilah sebabnya LMI semakin dibutuhkan menjelang dan saat pemilihan umum baik di tingkat legislatif maupun eksekutif, untuk menjamin informasi yang tersebar selama masa kampanye merupakan informasi yang benar dan tidak menyesatkan masyarakat.

Perkembangan pemikiran tentang LMI bergulir Sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia tentang Masyarakat Informasi / World Summit on the Information Society (WSIS) pada tahun 2003 dan 2005. Selanjutnya, pada tahun 2016 UNESCO memperkenalkan lima hukum literasi media dan informasi yang dapat dilihat pada tabel 1. Hukum pertama menyebutkan seluruh media dan informasi seluruhnya memang diperlukan untuk menjamin keterlibatan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan. Seluruh sumber informasi tersebut memiliki posisi yang setara. Hukum kedua, ketiga, dan keempat secara garis besar menyebutkan bahwa LMI merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia, baik pria maupun wanita, agar mereka dapat mengakses informasi / pengetahuan baru, serta mampu mengekspresikan diri melalui media yang ada. Pada hukum kelima disebutkan bahwa LMI merupakan sebuah proses yang panjang dan kompleks, sehingga dibutuhkan keberlanjutan dalam mekanisme pelaksanaannya (Singh, Kerr, dan Hamburger, 2016).

Tabel 1  
Lima Hukum Literasi Media dan Informasi UNESCO

<b>Law one</b>	Information, communication, libraries, media, technology, the Internet as well as other forms of information providers are for use in critical civic engagement and sustainable development. They are equal in stature and none is more relevant than the other or should be ever treated as such
<b>Law two</b>	Information, knowledge, and messages are not always value neutral, or always independent of biases. Any conceptualization, use and application of MIL should make this truth transparent and understandable to all citizens.
<b>Law three</b>	Information, knowledge, and messages are not always value neutral, or always independent of biases. Any conceptualization, use and application of MIL should make this truth transparent and understandable to all citizens.
<b>Law four</b>	Every citizen wants to know and understand new information, knowledge and messages as well as to communicate, even if she/he is not aware, admits or expresses that he/she does. Her/his rights must however never be compromised.
<b>Law five</b>	Media and information literacy is not acquired at once. It is a lived and dynamic experience and process. It is complete when it includes knowledge, skills and attitudes, when it covers access, evaluation/assessment, use, production and communication of information, media and technology content.

Sumber : Singh, Kerr, dan Hamburger, 2016, p. 35

Di era digital seperti saat ini semua calon peserta pemilu, baik legislatif ataupun eksekutif, menggunakan sosial media sebagai sarana kampanye untuk meraih simpati para pemilih pemula. Maraknya hoaks atau *hoaks* dan ujaran kebencian yang digulirkan oleh para pendukung calon presiden dan legislatif menyebabkan iklim politik saat ini menjadi sangat tidak sehat. Padahal, para remaja yang sekaligus pemilih pemula menggunakan sosial media tidak hanya sebagai sarana untuk berkomunikasi, tetapi juga sebagai sarana untuk mendapatkan informasi mengenai peserta pemilu. Disinilah pentingnya literasi media bagi para pemilih baru agar mampu memilih kandidat eksekutif dan legislatif dengan lebih bijaksana. Berdasarkan hal ini, maka Tim pengabdian masyarakat HI

Undip kemudian melakukan penyuluhan terhadap lima SMA di kota Semarang pada 27 September 2018 yakni SMA Islam Hidayatullah, SMA Muhammadiyah 1, SMA Bina Bangsa, SMAN 4 Semarang, dan SMAN 5 Semarang.

Penyuluhan yang dimaksud disini dilakukan untuk menciptakan perubahan yang baik dalam masyarakat dan dilakukan diluar pendidikan formal. Penyuluhan juga merupakan penghubung dua arah atau *two way traffic* antara pengalaman yang biasa dilakukan oleh seseorang, dan pengalaman baru yang dialami oleh seseorang (Setiana, 2005, p.2-3). Penyuluhan ini berusaha memberikan perubahan kebiasaan pelajar SMA dalam memahami informasi agar tidak terjebak dalam informasi palsu atau hoaks, melalui pengenalan filter informasi

dan media. Instrumen yang digunakan dalam penyuluhan ini berupa informasi grafis, audio, dan video mengenai penyimpangan informasi, serta langkah-langkah untuk mengatasi penyimpangan informasi

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Akses terhadap informasi yang efektif dan efisien sangat penting agar para remaja yang juga pemilih pemula dapat menyaring informasi yang benar dan kredibel, dan pada akhirnya dapat memilih pemimpin secara objektif. Oleh karena itu, pembahasan penyuluhan ini berdasarkan modul pembelajaran LMI yang dikeluarkan UNESCO tahun 2018, yang menyangkut (1) Pemahaman Hoaks sebagai penyimpangan informasi, baik itu Mis-informasi, Dis-informasi maupun Mal-informasi; (2) Melawan Disinformasi dan Misinformasi melalui LMI; serta (3) *Ex-Post Fact Checking* / Memeriksa Fakta setelah Dipublikasikan.

### 1. Memahami Hoaks dan Penyimpangan Informasi : Mis-informasi, Dis-informasi dan Mal-informasi

Sebelum memahami tentang hoaks, masyarakat harus terlebih dahulu memahami tentang penyimpangan informasi, dan perbedaan konsep-konsep di dalamnya. **Mis-informasi** adalah informasi yang salah, tapi orang yang menyebarkan percaya bahwa itu benar. Sedangkan **Dis-informasi** adalah informasi yang salah, dan orang yang menyebarkan mengetahui bahwa itu salah. Konsep ketiga yang perlu dibedakan disini adalah **Mal-informasi**, yakni informasi yang didasarkan pada kenyataan, tetapi digunakan untuk mencelakakan seseorang, organisasi, atau negara (UNESCO, 2018, p.44-52). Ketiganya sama-sama berbahaya dan harus disikapi dengan sangat bijaksana, terutama ketika penyimpangan informasi

semacam ini menjadi kendaraan politik selama masa kampanye. Pada tahun 2018 saja, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendata sekitar 1.000 penyimpangan informasi yang terjadi selama masa kampanye.

Contoh kasus penyimpangan informasi adalah kasus pemukulan terhadap aktivis Ratna Sarumpaet yang terjadi pada tahun 2018. Informasi yang salah (Dis-informasi) diberikan oleh Ratna Sarumpaet kepada sejumlah tokoh politik seperti Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang percaya akan kebenaran informasi tersebut dan menyebarkannya (Mis-informasi). Selanjutnya, informasi ini dihubungkan dengan kampanye hitam dari pihak lawan (Mal-informasi) yang dianggap hendak menyerang simpatisan para tokoh politik tersebut.

Penyimpangan informasi ini dapat hadir dalam beberapa jenis narasi. *Pertama*, Satire dan Parodi, yakni gaya bahasa untuk menyatakan sindiran terhadap suatu keadaan atau seseorang. *Kedua*, *False Connection*, ketika judul berita dan konten berita sangat berlawanan, sehingga pembaca berita tersebut merasa tertipu. Hal ini seringkali dilakukan oleh pelaku bisnis berita online untuk meningkatkan jumlah audiens yang berkunjung ke situs mereka. *Ketiga*, Konten yang Menyesatkan. Cara ini bertujuan untuk membingkai atau *framing* informasi dengan cara memangkas foto, kutipan, atau data secara sangat selektif. Pembaca berita akhirnya tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh, serta dapat menyebarkan informasi yang sesat. *Keempat*, konten palsu. Konten palsu biasanya ditegaskan dengan gambar yang diedit dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. *Kelima*, Konten yang dimanipulasi, yakni ketika konten asli dimanipulasi untuk menipu pembaca (UNESCO, 2018, pp 48-50).

## 2. Melawan Disinformasi dan Misinformasi melalui LMI

LMI memiliki tiga indikator utama yang harus dimiliki oleh seluruh pemangku kepentingan baik di tingkat makro, meso, maupun mikro. Ketiga indikator literasi tersebut adalah Akses, Evaluasi, dan Kreasi (Lee et. al., 2013). Komponen pertama literasi menyangkut kemampuan individu untuk mengakses, mencari, menemukan, serta menerima informasi dan konten media. Individu dapat dikatakan melek informasi dan media jika memiliki akses terhadap berbagai sumber informasi dan media. Hal ini penting untuk dilakukan terutama karena tidak ada media dan informasi yang netral, sebagaimana hukum kedua LMI. Komponen kedua literasi media dan informasi adalah kemampuan individu

untuk mengevaluasi informasi dan konten media yang diakses. Sedangkan komponen terakhir menyangkut pembuatan, penggunaan, dan monitoring informasi dan konten media. Pada tahap ini, individu mampu membuat atau menghasilkan informasi baru yang inovatif dan kreatif, namun tetap etis dan sesuai hukum yang berlaku (Lee et. al., 2013, p.59).

## 3. Ex-Post Fact Checking/Memeriksa Fakta setelah Dipublikasikan

The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) menyebutkan setidaknya ada delapan langkah yang dapat dilakukan untuk mengetahui palsu atau tidaknya sebuah informasi, dan menghindari penyebaran informasi tersebut (lihat gambar 1).



Gambar 1 Panduan Mengenali Informasi Palsu IFLA  
Sumber : "How to Spot Fake News", 2018

*Pertama*, memeriksa sumber informasi. Sumber yang akurat sangat dibutuhkan untuk mengetahui kebenaran suatu informasi. Tentunya, informasi yang benar akan berasal dari situs-situs yang

resmi dan kredibel, semisal situs resmi pemerintah, atau situs resmi organisasi internasional yang memiliki *track record* yang baik. Situs-situs dengan domain *.gov* atau *.go.id* (misalnya *www.kemlu.go.id*)

merupakan situs resmi pemerintah yang tentunya akan memberikan informasi yang akurat bagi para pembaca. Organisasi nasional atau internasional yang memiliki laporan tahunan terkait kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan juga dapat dipercaya kebenarannya. Situs ini memiliki nama domain *.org* (misalnya [www.greenpeace.org](http://www.greenpeace.org))

Kedua, memahami isi bacaan. Persaingan bisnis media daring sudah tidak dapat diragukan lagi. Semakin banyak situs berita yang membutuhkan lebih banyak *clickbot* dari pengguna internet untuk menambah pundi-pundi keuntungan mereka. Dengan kata lain, semakin banyak klik yang mereka dapatkan pada situs mereka, maka semakin banyak keuntungan materi yang dapat diraih (Miller et. al., n.d). Situs-situs tersebut kemudian menggunakan strategi bisnis yang curang dengan membuat judul yang terkesan bombastis untuk menarik pembaca dengan meng-klik judul tersebut, padahal mungkin isinya tidak selaras

dengan judul berita. Seringkali, pembaca hanya melihat judul berita tanpa membacanya secara menyeluruh, sehingga terjadi mis-informasi.

Ketiga, menelusuri sumber pendukung. Setiap informasi yang beredar di media sosial haruslah memiliki sumber pendukung, yakni dari mana informasi-informasi dalam berita tersebut diperoleh. Jika informasi tersebut ternyata tanpa sumber pendukung sama sekali, maka berita tersebut harus diragukan kebenarannya. Namun tidak jarang pula hoaks memiliki sumber pendukung yang terlihat kredibel. Pembaca tentunya harus lebih cermat dan teliti dalam melihat dan mencari kebenaran sumber pendukung tersebut. Pada gambar 2, penyebar berita melakukan dis-informasi dengan mengganti judul berita kemudian menggunakan sumber pendukung yang dipercaya oleh masyarakat. Padahal setelah ditelusuri, sumber pendukung tidak sesuai dengan informasi tersebut.



Gambar 2 Pemeriksaan Hoaks melalui Sumber Pendukung  
Sumber: Antoni, 2018

Keempat, menelusuri penulis berita. Setiap informasi yang kredibel tentu mencantumkan nama penulis dalam informasi tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban penulis terhadap isi bacaan. Pembaca harus mampu

menelusuri *track record* sang penulis melalui mesin pencarian daring.

Kelima, memeriksa tanggal penulisan artikel. Sejumlah hoaks menggunakan berita asli yang sudah usang, sehingga para pembaca tertipu dengan merasa bahwa informasi tersebut

terjadi di masa kini. Padahal konteks informasi tersebut sudah jauh berbeda.

Keenam adalah memeriksa apakah informasi tersebut merupakan satire atau bahkan lelucon. Para penulis satire dan lelucon tentu tidak bermaksud menyebarkan hoaks. Meskipun demikian, satire dan lelucon yang tidak dapat dipahami oleh pembaca, justru akan berakibat pada penyebaran hoaks. Di Amerika Serikat situs berita seperti *The Onion* menerbitkan artikel-artikel berita satire yang meniru media besar dan peristiwa yang sedang hangat. Namun tidak banyak pengguna media sosial yang memahami sindiran yang dituliskan oleh *The Onion* dalam situsnya. Kejelian dan kecerdasan pembaca untuk membedakan informasi semacam ini. Beberapa media sosial seperti Facebook juga telah melakukan upaya untuk “menandai” situs dan artikel berita satire untuk menghindari penyebaran mis-informasi.

Ketujuh, menghindari prasangka. Prasangka sosial adalah pendapat negatif terhadap seseorang yang dilandaskan pada keanggotaan orang tersebut dalam kelompok tertentu (Brehm dan Kassir, 1993). Prasangka bukanlah sesuatu yang inheren dalam diri manusia, melainkan melalui proses pembelajaran. Seseorang cenderung memilih informasi yang mendukung prasangka yang ada dalam pikirannya. Itulah sebabnya artikel berita yang mengandung prasangka negatif terhadap seseorang atau kelompok tertentu memiliki banyak pengunjung. Kedewasaan pembaca dan pengguna media sosial sangat dibutuhkan untuk membedakan fakta dan prasangka.

Kedelapan, memeriksa fakta kepada pakar. Cara termudah untuk memeriksa fakta adalah melalui aplikasi pendeteksi hoaks yang dapat diunduh

melalui telepon pintar, seperti *Hoaks Analyzer* atau *Hoaks Buster Tools* (HBT) yang juga merupakan karya anak bangsa. HBT misalnya, aplikasi ini memungkinkan pengguna media digital untuk melaporkan hoaks, mencari kebenaran narasi, gambar, serta video yang didapatkan secara daring. Di tingkat internasional, terdapat situs-situs yang juga mampu membantu pembaca untuk mengecek kebenaran hoaks, yakni FactCheck.org, Snopes.com, the Washington Post Fact Checker dan PolitiFact.com.

## KESIMPULAN

Tingginya tingkat penggunaan media sosial sebagai sarana untuk mendapatkan informasi di kalangan remaja SMA menyebabkan mereka rentan terhadap informasi yang keliru atau hoaks. Dalam pesta demokrasi 2018-2019, hal ini tentunya akan mengancam objektivitas pelajar SMA sebagai pemilih pemula. Gerakan Literasi Media dan Informasi atau LMI yang diusung oleh UNESCO menjadi sangat dibutuhkan agar mereka mampu menjadi pengguna media sosial yang bijak dalam sistem demokrasi. Materi penyuluhan ini menyangkut (1) Pemahaman Hoaks sebagai penyimpangan informasi : Mis-informasi; Dis-informasi; dan Mal-informasi, (2) Melawan Disinformasi dan Misinformasi melalui LMI, serta (3) Ex-Post Fact Checking / Memeriksa Fakta setelah Dipublikasikan. Penyuluhan ini ditekankan pada metode pemeriksaan fakta yang terdiri dari pengecekan sumber, isi bacaan, penulis artikel, sumber pendukung, hingga pengecekan melalui aplikasi dan situs internet, agar para peserta penyuluhan dapat menyaring informasi dengan lebih akurat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antoni, A. (2018, August 30). Pemilih Pemilu 2019 di Jateng Ditetapkan 27.430.269 Orang. *Sindonews.com*, dapat diakses di : <https://daerah.sindonews.com/read/1334359/22/>
- Brehm, S. S., & Kassin, S. M. (1993). *Social psychology* (2nd ed.). Boston: Houghton Mifflin Company.
- Horton, F. W. (2008). *Understanding Information Literacy: A Primer*. Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- How To Spot Fake News. (2018, July 17). dapat diakses di <https://www.ifla.org/publications/node/11174>
- Lee, Alice Y.L. et. al. (2013). *Conceptual Relationship of Information Literacy and Media Literacy in Knowledge Societies*. Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- Miller B., Pearce P., Grier C., Kreibich C., Paxson V. (2011) What's Clicking What? Techniques and Innovations of Today's Clickbots. Dalam : Holz T., Bos H. (eds) *Detection of Intrusions and Malware, and Vulnerability Assessment*. DIMVA 2011. Lecture Notes in Computer Science, vol 6739. Springer, Berlin, Heidelberg
- Setiana. L. (2005). *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Singh, J., Kerr, P., and Hamburger, E. (eds.) (2016). *Media and Information Literacy: Reinforcing Human Rights, Countering Radicalization and Extremism*. Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- Sufyan, M. (2017, January 19). 2017, Momentum Menegakkan Kehormatan Pers. *Kompas*, dapat diakses di : <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/19/08212711/2017>
- UNESCO (2013). *Global Media and Information Literacy Assessment Framework: Country Readiness and Competencies*. Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- UNESCO (2018). *Journalism, 'Fake News' & Disinformation : Handbook for Journalism Education and Training*. Paris : United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
- We are Social. 2018. *Digital in 2018*, dapat diakses di : <https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018>